

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian :

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Jurnal	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Peran UNICEF dalam Memberikan Bantuan Terhadap Anak-anak Korban Krisis Kemanusiaan di Madagaskar Tahun 2018	Jurnal Online Mahasiswa Fisip Vol. 8 No. 2 tahun 2021	Rahma Sari Putri Adheila	Membahas mengenai peran UNICEF dalam memberikan bantuan kepada anak-anak yang terdampak krisis kemanusiaan	Permasalahan dan isu yang terjadi. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai anak-anak yang menjadi korban krisis kemanusiaan di Madagaskar. Sedangkan, penelitian membahas tentang kelaparan anak
2	Peran UNICEF dalam Mengatasi Peningkatan Eksploitas Terhadap Anak Di Indonesia Tahun 2014-2019	Jurnal FISK Vol. 2 No. 1 tahun 2021	Kharunnisa, Dwi Ardiyanti	Membahas mengenai peran UNICEF dalam menangani peningkatan eksploitas anak di Indonesia	Permasalahan dan isu yang terjadi. Jurnal tersebut membahas mengenai semakin maraknya eksploitas yang terjadi pada anak-anak. Sedangkan, penelitian

					membahas mengenai permasalahan anak dan kelaparan anak
3.	Upaya UNICEF dalam Menangani Pembebasan Tentara Anak di Sudan Selatan Tahun 2015-2018	Review of International Relations Vol. 3 No. 2 tahun 2021	Reikene Audreya M N, Ganjar Widhiyoga, dan Andhika Drajat M	Membahas mengenai upaya dan peran UNICEF dalam melakukan pembebasan tentara anak di Sudan Selatan	Isu yang terjadi. Di dalam penelitian tersebut membahas mengenai pembebasan tentara anak. Sedangkan, penelitian membahas mengenai kelaparan anak
4.	Peranan UNICEF dalam Menangani <i>Child Trafficking</i> di Indonesia	Islamic World and Politics Vol. 2 No. 2 tahun 2018	Nori Oktadewi dan Khairiyah	Membahas mengenai peran UNICEF dalam menangani <i>Child Trafficking</i> di Indonesia	Kasus dan isu yang terjadi. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai masih maraknya terjadi <i>Child Trafficking</i> di Indonesia. Sementara itu, penelitian ini membahas tentang kelaparan anak
5.	Peran UNICEF dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di	Jurnal Online Mahasiswa Fisip Vol. 2 No. 2 tahun 2015	Asmarita	Membahas mengenai peran UNICEF dalam menangani maraknya kasus	Isu yang terjadi. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai semakin maraknya kasus

	Bawah Umur di India			pernikahan dini di India	pernikahan dini atau anak di bawah umur yang terjadi di India. Sedangkan di penelitian membahas mengenai kelaparan anak yang masih terjadi akibat dari beberapa macam faktor
--	---------------------	--	--	--------------------------	--

Literatur pertama berjudul **“Peran UNICEF dalam Memberikan Bantuan Terhadap Anak-anak Korban Krisis Kemanusiaan di Madagaskar Tahun 2018”** dalam Jurnal Online Mahasiswa Fisip Vol. 8 No. 2 tahun 2021. Literatur ini menjelaskan bagaimana peran UNICEF dalam membantu memenuhi hak-hak anak di Madagaskar menghadapi berbagai ancaman. Dengan adanya program-program yang dikeluarkan oleh UNICEF Madagaskar membuat anak-anak menunjukkan perkembangan dan kesejahteraan bagi mereka.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bahwa dengan adanya peran UNICEF dapat menangani permasalahan anak khususnya kelaparan anak di Madagaskar. Dalam literatur ini menjelaskan bahwa dengan adanya peran organisasi internasional dapat membantu sebuah negara yang sedang menghadapi suatu masalah. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif serta pengumpulan data nya melalui berbagai macam sumber seperti jurnal, buku, dan dokumen tertulis.

Hasil penelitian literatur ini menjelaskan untuk mewujudkan peran UNICEF dalam menangani krisis kemanusiaan dengan melakukan kerjasama bersama mitranya di bidang publik maupun swasta. Adapun, program yang telah direalisasikan oleh UNICEF yaitu berhasil mendistribusikan berbagai bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat Madagaskar seperti perlengkapan darurat, peralatan sekolah, peralatan medis, obat-obatan, penyediaan klinik keliling, memberikan dukungan psikososial, membuat ruang kelas sementara untuk anak-anak, dan melakukan peningkatan ketahanan serta penguatan sistem kelembagaan.

Dengan adanya program-program UNICEF Madagaskar yang berhasil direalisasikan selama tahun 2018-2020 mendapatkan beberapa pencapaian seperti sekitar 7,2 juta anak telah divaksinasi, anak-anak penderita SAM mendapatkan perawatan hingga sembuh, dan mendapatkan kemudahan dalam mengakses air bersih dan sanitasi yang baik bagi anak-anak maupun masyarakat Madagaskar (Putri Adelia, 2021).

Literatur kedua berjudul **“Peran UNICEF dalam Mengatasi Peningkatan Eksploitas Terhadap Anak Di Indonesia Tahun 2014-2019”** dalam Jurnal FISK Vol. 2 No. 1 tahun 2021. Literatur ini membahas tentang peran UNICEF dalam menangani ekspolitas anak yang meningkat terhadap anak di Indonesia. Adapun, dengan hadirnya UNICEF di Indonesia dapat mengurangi eksploitas pada anak dengan cara melaksanakan program-program yang telah dibentuk oleh UNICEF dari tahun 2014 hingga 2019.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran UNICEF dalam mengatasi eksploitas pada anak di Indonesia melalui program-program yang telah

direalisasikan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta pengumpulan data nya melalui berbagai macam sumber seperti buku, jurnal, koran, majalah, dan analisis dokumenter.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa upaya UNICEF dalam mengatasi eksploitasi pada anak di Indonesia dengan melakukan suatu kesepakatan rencana aksi program negara, mengadakan kampanye dan sosialisasi, melakukan kerjasama dengan NGO dan pemerintah daerah, serta mendorong Indonesia agar mengadopsi Konvensi Hak Anak. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh UNICEF dapat menurunkan angka kasus eksploitasi pada anak di Indonesia (Khairunnisa & Ardiyanti, 2021).

Literatur ketiga berjudul **“Upaya UNICEF dalam Menangani Pembebasan Tentara Anak di Sudan Selatan Tahun 2015-2018”** dalam jurnal *Review of International Relations* Vol. 3 No. 2 tahun 2021. Literatur ini membahas tentang upaya UNICEF dalam membebaskan tentara anak di Sudan Selatan. Di mana UNICEF sebagai organisasi internasional di bawah naungan PBB memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak dalam jangka yang panjang, sehingga dibutuhkan nya bantuan UNICEF dalam membebaskan anak-anak yang dijadikan tentara oleh kelompok bersenjata agar dapat memberikan kehidupan anak-anak yang damai dan bebas.

Literatur ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya UNICEF dalam membebaskan anak-anak yang dijadikan tentara anak di Sudan Selatan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif serta pengumpulan data nya

melalui berbagai macam sumber seperti jurnal, buku, artikel, dan analisis dokumenter.

Hasil penelitian dalam literatur ini memaparkan bahwa dengan adanya peran UNICEF dapat membebaskan anak-anak Sudan Selatan dari perekrutan sebagai tentara anak yang mana UNICEF berhasil membantu sekitar 3.677 anak-anak dalam pembebasan tentara anak sejak tahun 2015. Selain itu, UNICEF juga menjalankan salah satu program nya yaitu program reigrasi di mana UNICEF melindungi identitas anak-anak dalam perekrutan kembali tentara anak dari kelompok bersenjata. serta UNICEF menunjukkan peran nya sebagai motivator yang mana UNICEF menyelenggarakan kampanye yang berjudul “Anak-anak, Bukan Tentara”. dengan adanya kampanye tersebut dapat mewujudkan suatu kesepakatan dari masyarakat global bahwa anak-anak tidak diperbolehkan direkrut sebagai tentara anak (Audreya M N, 2021).

Literatur keempat berjudul “**Peranan UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia**” dalam jurnal *Islamic World and Politics* Vol. 2 No. 2 tahun 2018. Literatur ini membahas tentang bagaimana peran UNICEF dalam mengatasi *Child Trafficking* pada anak di Indonesia dan faktor apa saja yang mempengaruhi *Child Trafficking* di Indonesia masih tinggi. Dalam menangani permasalahan anak yang terjadi di Indonesia, UNICEF program-program yang akan direalisasikan seperti program di bidang kesehatan dan gizi, pendidikan dasar, perlindungan anak, penanganan penderita HIV/AIDS dan air bersih dan sanitasi.

UNICEF menunjukkan keterlibatan nya dengan ikut andil dalam membantu dengan meratifikasi kovensi hak anak dan membuat undang-undang perlindungan

anak serta program NAPs (*Nasional Plan of Action For the Elimination of Child Trafficking*) yang dibuat oleh UNICEF dan RPSA dalam mengurangi angka trafficking di Indonesia.

Literatur ini memiliki tujuan mengetahui peran UNICEF dalam mengatasi *Child Trafficking* di Indonesia dengan menggunakan kualitatif serta pengumpulan data hya melalui berbagai macam sumber seperti jurnal, berita, artikel, dan buku serta dan menggunakan teori organisasi internasional dan hubungan internasional.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa adanya hambatan UNICEF dan pemerintah Indconesia dalam melakukan peran nya untuk mengurangi angka *Child Trafficking* di Indonesia. Faktor eksternal merupakan faktor yang menjadi hambatan bagi UNICEF dan pemerintah Indonesia karena faaktor tersebut masih berada dalam ruang lingkup pemerintah Indonesia, aparat keamanan, letak geografis, dan masyarakat yang membuat kasus *Child Trafficking* di Indonesia masih tinggi (Oktadewi, 2018).

Literatur kelima berjudul “**Peran UNICEF dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur di India**” dalam Jurnal Online Mahasiswa Fisip Vol. 2 No. 2 tahun 2015. Literatur ini membahas tentang peran UNICEF dalam menangani kasus pernikahan anak di bawah umur di India dengan melakukan kerjasama bersama pemerintah india di bidang hukum, pendidikan, dan sosial. Dengan adanya kerjasama tersebut dapat menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur di India.

Penelitian ini menggunakan teori organisasi internasional dan prespektif pluralisme serta menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan sebuah fenomena.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa UNICEF menunjukkan peran nya sebagai organisasi internasional melakukan kerjasama dengan pemerintah India di beberapa bidang seperti huku, pendidikan, dan sosial. Dalam bidang hukum, UNICEF menjadi advokasi untuk anak-anak dalam mendapatkan haknya. Sebelumnya, pemerintah India sudah membuat sebuah peraturan *the prohibition of child marriage of act 2016*. Akan tetapi, implementasi dari peraturan tersebut tidak berjalan secara efektif, sehingga UNICEF mendukung pemerintah India untuk mengimplementasikan kembali peraturan tersebut dengan cara membuat buku panduan untuk masyarakat mengenai peraturan adanya hukuman terhadap pernikahan anak

Adapun, di bidang pendidikan, UNICEF melakukan sosialisai dan membuat ilustrasi mengenai bahaya nya pernikahan dini di sampul buku sekolah. Dan di bidang sosial, UNICEF membuat suatu program yaitu Deepshikha yang mana program ini menjadi tempat untuk anak-anak belajar dan mendiskusikan mengenai pernikahan anak di bawah umur (Asmarita, 2015).

Dari kelima literatur reuiu yang telah dipaparkan di atas, terdapat kesimpulan yang sama mengenai penelitian yang sedang dikerjakan. Mulai dari peran UNICEF yang menjadi subjek penelitiannya. Adapun, beberapa literatur menggunakan teori organisasi internasional yang menjadi acuan bagi peneliti. Dengan adanya peran atau upaya dari UNICEF dapat mengatasi berbagai masalah-masalah pada anak.

Selain itu, adanya sebuah perbedaan dalam rencana penelitian yang sedang penulis kerjakan, di mana penulis berfokus pada permasalahan kelaparan anak yang terjadi di Sudan Selatan pada tahun 2017-2021 dengan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis sebuah data dan menggunakan teori serta konsep yang dapat menjadi alat analisis penulis seperti teori organisasi internasional, prespektif pluralisme, dan konsep kelaparan anak. Sementara itu, beberapa literatur revid memiliki permasalahan yang berbeda dan meneliti di negara yang berbeda juga.

2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1. Teori Organisasi Internasional

Organisasi Internasional merupakan konsep yang berasal dari prespektif liberalisme. Prespektif ini percaya adanya permadaian abadi (*perpetual peace*) yang dapat diwujudkan melalui Kerjasama. Prekpektif ini juga memandang bahwa masalah-masalah di dunia internasional dapat diatas dengan melakukan suatu Kerjasama dan mendirikan suatu organisasi internasional. Menurut Clive Archer mengemukakan bahwa organisasi internasional merupakan suatu struktur formal yang dibentuk atas dasar suatu kesepakatan antar anggota-anggota atau pemerintah dan non pemerintah yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu kepentingan bersama (Archer, 2001). Sementara itu, Duverger mendefinisikan organisasi internasional adalah salah satu bentuk organisasi hubungan internasional yang dapat dilihat dari institusi yang berbentuk kolektif atau struktur dasar organisasi sosial yang ditetapkan oleh hukum atau tradisi manusia seperti diplomasi dan perdaganga (Archer,

2001). Cliver Archer membagi peranan organisasi internasional menjadi tiga kategori, yaitu :

1. Organisasi internasional sebagai Intrumen, negara menggunakan organisasi internasional untuk dijadikan sebagai pembuatan suatu kebijakan negara untuk mencapai kepentingan yang menjadi tujuan. Adapun, organisasi internasional juga digunakan sebagai pelengkap kebijakan suatu negara.
2. Organisasi internasional sebagai Arena, organisasi internasional digunakan sebagai forum atau tempat berkumpul dan bertemu serta menjadi tempat dalam melakukan kerja sama para anggota untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang sedang atau akan dihadapi yang bertujuan guna memperoleh kepedulian internasional
3. Organisasi internasional sebagai Aktor Independen, organisasi internasional memiliki kewenangan dalam membuat suatu keputusan tanpa ada campur dan paksaan dari pihak lain.

Dari tiga peranan tersebut menunjukkan bahwa peran organisasi internasional dapat menjadi fasilitator, inisiator, rekonsilitator, hingga mediator. Akan tetapi, Cliver Archer juga mengemukakan bahwa ada sembilan fungsi dari organisasi internasional yang dapat berpengaruh pada sistem internasional (Archer, 2001).

1. Artikulasi dan Agresi, organisasi internasional memiliki peran sebagai intrumen atau alat suatu negara yang dapat mengartikulasikan dan mengagresikan kepentingan yang di tuju.

2. Norma, organisasi internasional ikut turut aktif dalam berperan sebagai aktor yang dapat membagikan dan menerapkan nilai serta prinsip-prinsip non diskriminatif dalam sistem internasional.
3. Rekrutmen, organisasi internasional memiliki peran dalam merekrut partisipan atau para anggota untuk ikut dalam sistem politik internasional.
4. Sosialisasi, dalam proses sosialisasi di ruang lingkup internasional dilakukan oleh negara-negara dari sejumlah lembaga. Tujuan dari sosialisasi ini untuk menerapkan dan menerima nilai-nilai yang berlaku di sistem internasional dengan tujuan dapat menaikkan nilai kerjasama sesama negara anggota.
5. Pembentuk Peraturan, dalam sistem internasional tidak terdapat lembaga yang bertugas untuk membuat peraturan bersifat resmi seperti pemerintah atau parlemen. Sedangkan, dalam sistem domestik kerap kali adanya penambahan dari sejumlah lembaga seperti pemerintah lokal atau regional. Akan tetapi, jika di dalam sistem internasional yang menganut anarki tidak dapat membentuk peraturan yang mana pembentuk peraturan atas dasar persetujuan dari negara-negara anggota dan hanya dapat dilakukan oleh organisasi internasional.
6. Pelaksanaan Peraturan, dalam sistem internasional penerapan aturan dilakukan oleh lembaga pemerintan. Adapun fungsi ini memiliki

keterbatasan pengawasan dalam penerapannya, karena wewenang yang dapat menerpakan fungsi ini hanya negara-negara anggota.

7. Pengesahan Aturan, di dalam fungsi ini organisasi internasional memiliki tugas dalam mengesahkan peraturan-peraturan yang terdapat pada sistem internasional.
8. Data atau Informasi, fungsi ini organisasi internasional memiliki peran dalam mencari, mengumpulkan, mengolah hingga menyebarkan data atau informasi.
9. Operasional, organisasi internasional melakukan beberapa fungsi operasional di berbagai hal dan kegiatan ini kerap kali dilakukan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat (Archer, 2001).

Fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan jika organisasi internasional memiliki sumber daya informasi yang cukup dan legitimasi dari anggotanya untuk menunjang bahwa kesahnan data dan kepercayaan masyarakat dunia yang tengah dihadapkan suatu permasalahan atau konflik yang terjadi di negara nya. Kemudian, IGO memiliki sifat netral dalam mengambil suatu keputusan, agar terjaga netralisasinya maka sumber informasi atau data dari IGO harus lengkap, akurat, dan faktual dari berbagai sudut pandang.

UNICEF sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang mensejahterakan dan melindungi hak anak memiliki sifat netral yang mana jika akan menentukan suatu keputusan, maka UNICEF memutuskan keputusan tersebut dengan sumber data yang lengkap dan faktual sehingga persoalan-persoalan yang tengah di hadapi oleh negara-negara anggota dapat

menemukan solusi yang tepat. Seperti yang terjadi di Sudan Selatan, masalah yang tengah di hadapi yaitu konflik internal yang berdampak di semua kalangan terutama anak-anak yang menjadi korban paling rentan dan dampak yang di timbulkan mulai dari kerawanan pangan, kelaparan, kekerasan, pelecehan seksual, putus sekolah, hingga kehilangan tempat tinggal membuat banyak masyarakat mengungsi ke negara-negara tetangga. Maka dari itu, UNICEF menunjukkan peran nya dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah setempat atau anggotanya dalam membantu anak-anak keluar dari permasalahan yang tengah di hadapi terutama kelaparan pada anak.

2.2.2. Konsep Kelaparan Anak

Menurut SDGs menjelaskan kelaparan merupakan sebuah kondisi yang diakibatkan oleh kurangnya konsumsi pangan kronik. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis dapat berakibat buruk pada masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Tidak semua orang mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pangan yang dibutuhkan, sehingga hal ini dapat menyebabkan kelaparan dan kekurangan gizi dalam skala besar di dunia (SDGs, 2022).

Kelaparan juga merupakan permasalahan serius yang menimbulkan berbagai dampak seperti dapat menghambat produktivitas manusia dan lingkungan, dapat menurunkan intensitas kinerja masyarakat, menimbulkan berbagai banyak penyakit, dan dapat meningkatkan angka kriminalitas di lingkungan masyarakat.

Kondisi saat ini, sebagian dari penduduk dunia mengalami kekurangan pangan secara kronis dan lebih parah nya mereka tidak mampu mendapatkan pangan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan energi minimum mereka. Anak-anak yang berusia di bawah lima tahun (balita) banyak menderita kekuarangan gizi kronis. Kondisi ini terus meningkat seiring dengan musim kemarau yang panjang terus terjadi dan ada juga beberapa factor yang menyebabkan terjadinya kelaparan seperti kemiskinan, ketidakstabilan sistem pemerintah, konflik, kekerasan, perubahan iklim, dan ketidakberdayaan seperti pada anak-anak, wanita, dan lansia (Innovillage, 2022).

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat menemukan titik terang dengan adanya *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini memiliki kesinambungan dengan SGD's poin dua, yaitu tanpa kelaparan (*zero hunger*). Poin kedua tersebut memiliki tujuan utama yaitu menghentikan atau mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan memajukan sektor pertanian yang berkelanjutan (SDGs, 2022). Tujuan-tujuan dari SDGs harus secepatnya dicapai karena kita dapat mengetahui bahwa kelaparan merupakan suatu masalah sangat kronis sehingga dapat memunculkan berbagai masalah lain. Kemudian, dengan adanya tujuan dari SDGs poin kedua dapat mengatasi sekaligus mewujudkan target yang akan di capai seperti menurunkan hingga mengakhiri angka kelaparan, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan, dan memajukan pertanian berkelanjutan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dengan bertani.

2.2.3. Global Governance

Global Governance merupakan salah satu konsep dalam Hubungan Internasional yang di dalamnya terdapat proyek politik global dalam menentang suatu kapasitas ilmu-ilmu yang dapat menghasilkan wawasan teoritis dan dapat dijadikan alat praktis untuk menjelaskan transformasi kontemporer yang ada di dalam tatanan global.

Menurut Rosenue menyatakan bahwa *Global Governance* mencakup sistem pemerintahan di semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang mana hal ini dimulai dari keluarga hingga organisasi yang memiliki upaya untuk melaksanakan pengendalian yang berdampak pada transnasional. Selain itu, Rosenue membagi empat elemen konstitutif yang ada di dalam *Global Governance* seperti sistem pemerintahan, kegiatan manusia, pencapaian, dan dampak transnasional. (Rosenau, 1922).

Global Governance adalah suatu gabungan dari macam cara individu dan institusi yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta dalam mencapai suatu kepentingan mereka bersama. Hal ini salah satu wujud proses berkelanjutan yang di dalamnya terdapat berbagai macam kepentingan-kepentingan dengan tindakan kooperatif yang dilakukan. Di dunia perpolitikan, tata kelola global dipandang hanya sebatas hubungan antara aktor dengan aktor lain. Akan tetapi, dengan berkembangnya zaman tata kelola global dapat melibatkan organisasi non-negara (LSM) gerakan perusahaan multinasional dan pasar modal global. Adanya interaksi dengan media massa global ini dapat berpengaruh besar pada tata kelola global (Archer, 2001).

Rosenue diatas menjelaskan bahwa adanya prinsip yang teguh pada suatu gagasan yang mana negara tidak dapat melakukan apapun sendiri. Hal ini mengartikan bahwa negara membutuhkan bantuan kepada pemerintah atau aktor lain dan dengan begitu pemerintah merupakan landasan paling penting di organisasi dunia. Akan tetapi, dengan adanya peningkatan penyebaran wewenang dan hilangnya kendali, negara dan organisasi pemerintah sudah tidak menjadi satu-satunya aktor terpenting di dunia. Disisi lain, semuanya tergantung pada permasalahan yang di hadapi oleh suatu negara hingga tetap menjadi aktor yang masih menjaga wilayah kedaulatannya, namun mereka sudah melewati masa jayanya (Rosenau, 1922).

Dalam hal ini negara tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang di hadapi sendiri, maka dari itu negara memerlukan bantuan dari aktor lain dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negaranya. Seperti halnya yang terjadi di Sudan Selatan dalam menangani permasalahan kemusiaan seperti kelaparan yang di bantu oleh organisasi internasional seperti UNICEF. Disini UNICEF menunjukkan perannya dalam menangani kelaparan anak yang terjadi di Sudan Selatan. Akan tetapi, pada *global governance* ini organisasi internasional tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sendiri tanpa adanya keterlibatan dari negara Sudan Selatan hal ini disebabkan oleh setiap negara memiliki kewenangan atas kedaulatan negaranya serta kontribusi yang diberikan oleh setiap organisasi internasional yang mana ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan isu kemanusiaan ini.

2.3. Asumsi

asumsi sebagai landasan untuk menentukan alur penelitian. Asumsi merupakan landasan berpikir peneliti dalam bentuk pernyataan yang dibangun berdasarkan postulat. Postulat merupakan sebuah kebenaran yang terbentuk dari sumber-sumber penelitian sebelumnya. Untuk itu penulis membuat asumsi dari penelitian ini sebagai berikut : *“Dengan adanya konflik di Sudan Selatan, hal ini telah menyebabkan angka kelaparan anak meningkat. Oleh karena itu, UNICEF sebagai organisasi internasional yang mempunyai fungsi mendata atau memberikan informasi dan fungsi operasional melakukan serangkaian peran melalui program nutrisi untuk meminimalisir kelaparan anak di Sudan Selatan tahun 2017-2021 ”.*

2.4. Kerangka Analisis

